

**KAJIAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN
TENAGA KERJA**

Muhammad Hanri, Ph.D.

muhammad.hanri06@ui.ac.id

Nia Kurnia Sholihah, M.E.

nia.kurnia91@ui.ac.id

**Izyan Pijar Bungabanga
Satyagraha, S. E.**

izyan.pijar@ui.ac.id

DAFTAR ISI

Ketimpangan Ekonomi di
Indonesia – 1

Kondisi di Pasar Tenaga Kerja
– 2

Akses Pendidikan dan
Layanan Kesehatan– 3

Kesenjangan Akses
Infrastruktur – 3



Labor Market Brief dapat diakses setiap bulan secara gratis dengan memindai kode QR di atas atau melalui tautan: <https://bit.ly/labormarketbrief>

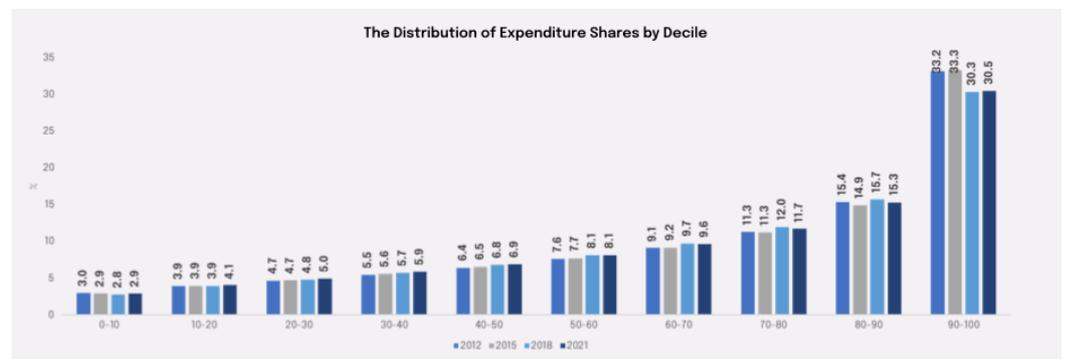
Kondisi Ketimpangan di Indonesia

Ringkasan

Indonesia sebagai negara berkembang terbesar keempat di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang bersifat inklusif. Permasalahan ketimpangan masih ditemukan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, dan akses infrastruktur. Ketimpangan yang terjadi di Indonesia menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat sepenuhnya merasakan dampak positif dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Meski tercatat memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat di Indonesia menjadi permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Koefisien Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan setelah tahun 2000. Dengan kata lain, semakin besar proporsi masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya menikmati dampak positif dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Gini Index Indonesia terbilang tinggi dengan nilai mencapai 0.378, melampaui Gini Index Vietnam, Thailand, dan India. Namun, angka ini masih berada di bawah Gini Index Filipina yang mencapai 0.465.



Gambar 1. Ketimpangan Berdaarkan Desil Antartahun

Ketimpangan di Indonesia telah membaik dalam satu dekade terakhir, seiring dengan adanya penurunan pendapatan pada masyarakat di desil atas yang dibarengi dengan peningkatan kecil pada pendapatan masyarakat desil 1 sampai 4. Dengan lima pulau besar dan lebih dari 16.000 pulau kecil, faktor geografis menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembangunan di Indonesia. Beberapa daerah dapat memiliki akses sumber daya dan peluang ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Meski secara umum telah menunjukkan kemajuan, perbandingan kondisi ketimpangan ekonomi yang terjadi di Jawa dan Luar Jawa menunjukkan adanya *progress* yang berbeda. Sementara nilai koefisien Gini di Luar Jawa secara konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga 2021, koefisien Gini di Jawa justru tidak berubah sejak tahun 2018.

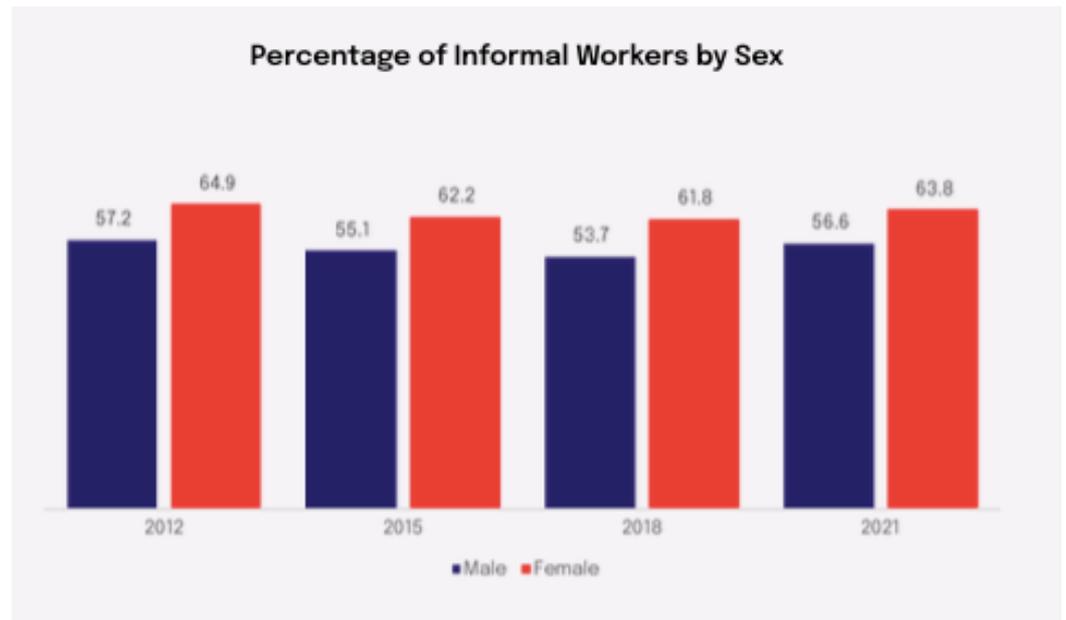
Membandingkan kepemilikan aset dari tahun ke tahun, nilai koefisien Gini untuk indeks aset menunjukkan tren menurun dari yang pada tahun 2012 bernilai 0.796 menjadi 0.738 pada tahun 2021. Ketimpangan kepemilikan aset juga terjadi antar wilayah di Indonesia. Dengan mengecualikan kepemilikan kapal, masyarakat wilayah Indonesia timur memiliki kekayaan aset yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat. Sementara itu, wilayah Kalimantan utara menjadi salah satu wilayah yang dengan kepemilikan aset terbanyak dibandingkan wilayah lainnya. Secara umum, daerah yang masyarakatnya memiliki akumulasi aset tinggi berada di dekat pusat kota.

Kondisi di Pasar Tenaga Kerja

Terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam akses asuransi tenaga kerja. Tenaga kerja yang berada di kuintil pendapatan terbawah cenderung memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mendapatkan perlindungan asuransi dibandingkan mereka yang berada di kuintil lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa asuransi kecelakaan kerja telah meng-cover 72.3% dari masyarakat kuintil tertinggi dan hanya 4.5% dari masyarakat kuintil terbawah. Kondisi serupa juga ditemukan pada produk asuransi jiwa dan asuransi hari tua.

Dilihat dari tingkat partisipasi tenaga kerja, ditemukan kesenjangan antar gender, dimana wanita memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah

dibandingkan pria. Pada tahun 2021, hanya setengah dari populasi wanita yang bekerja. Kondisi ini cukup kontras dibandingkan dengan pria yang 76.7% dari populasinya telah berpartisipasi sebagai tenaga kerja. Meski demikian, dilihat dari tingkat pengangguran, angka pengangguran pada wanita (6.1%) justru lebih rendah dibandingkan laki laki (6.7%).

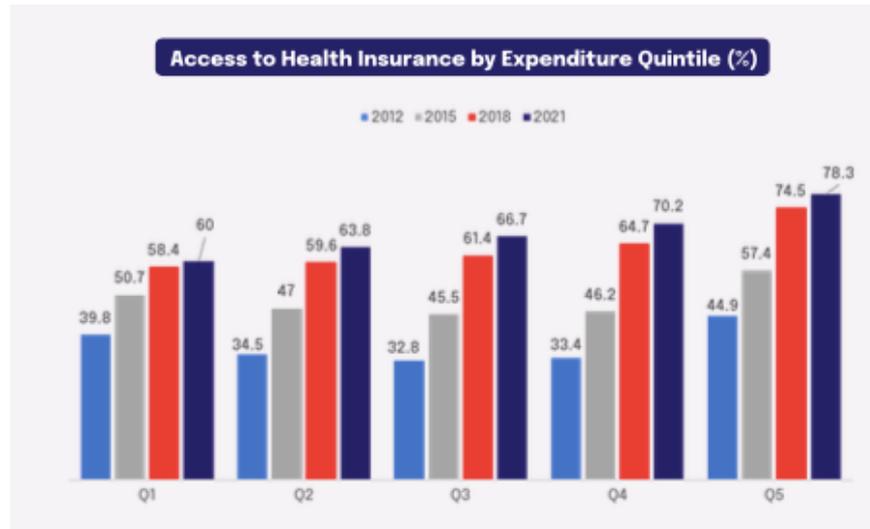


Gambar 2. Pekerja Informal Berdasarkan Jenis Kelamin

Di saat yang sama, wanita di pasar tenaga kerja cenderung berada di posisi yang lebih rentan karena banyak di antaranya bekerja di sektor informal. Keterlibatan wanita di sektor informal relatif lebih tinggi daripada pria. Sebanyak 63.8% tenaga kerja wanita bekerja di sektor informal, sementara pada pria persentase ini hanya mencapai 56.6%.

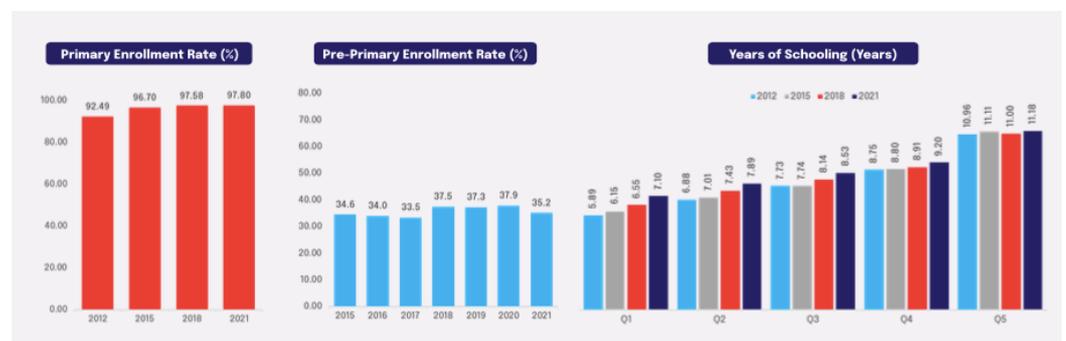
Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Bukan hanya dalam aspek keuangan, ketimpangan terlihat pada akses terhadap aset-aset sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Dilihat dari akses terhadap layanan asuransi kesehatan, masih ditemukan adanya kesenjangan. Namun, *universal health coverage* yang mulai diberlakukan sejak 2014 telah berhasil meningkatkan akses asuransi kesehatan.



Gambar 3. Akses terhadap Jaminan Kesehatan Nasional

Sementara itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan telah menunjukkan hasil positif. Hal ini tercermin dalam angka partisipasi pendidikan dasar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 97.80% pada tahun 2021. Demikian pula halnya dengan angka lama bersekolah yang secara umum menunjukkan tren positif. Sayangnya, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, permasalahan kesenjangan akses masih terlihat dari rerata lama bersekolah dari masing-masing kuintil. 20% masyarakat terkaya di Indonesia secara rata-rata menduduki bangku pendidikan selama 4 tahun lebih lama dibandingkan 20% masyarakat termiskin. Pada kuintil terbawah, rerata lama bersekolah pada tahun 2021 berada pada angka 7.10 tahun atau setara dengan sekolah menengah pertama, sementara pada kuintil tertinggi sebesar 11.18 tahun.



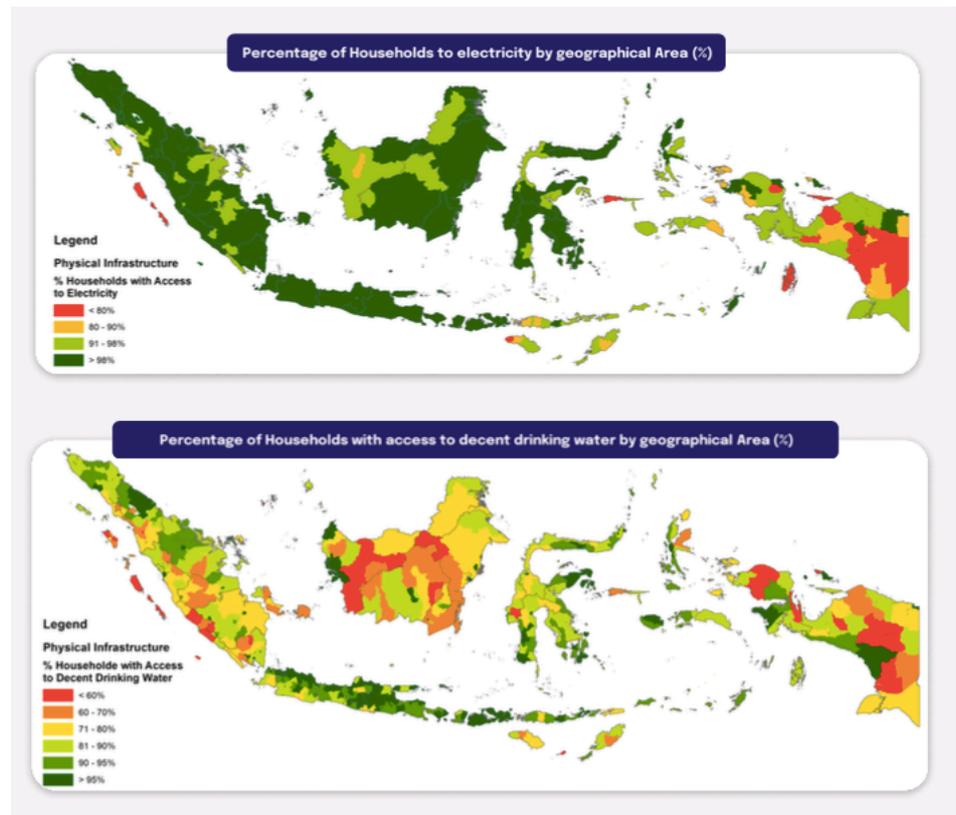
Gambar 4. Akses Terhadap Pendidikan

Kesenjangan Akses Infrastruktur

Kesenjangan akses infrastruktur di Indonesia dapat dilihat berdasarkan beberapa aspek. Pertama adalah akses teknologi digital. Dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang menikmati tingkat akses digital sebesar 67.50%, masyarakat pedesaan memiliki tingkat akses digital yang hanya sebesar 46.18%. Kesenjangan ini juga terlihat antara masyarakat Jawa dan Luar Jawa, dimana masyarakat Jawa memiliki akses digital yang lebih baik. Selain lokasi, besarnya pendapatan juga berpengaruh terhadap akses teknologi digital, dimana kuintil tertinggi memiliki akses digital yang hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan kuintil terbawah.

Kedua, terdapat perbedaan tingkat akses sanitasi pada masing-masing kelompok pengeluaran, dimana lagi-lagi masyarakat yang lebih kaya memiliki akses yang lebih baik. Apabila dibandingkan kondisi di tahun 2012, kesenjangan ini sudah jauh membaik. Pada tahun 2012, tingkat akses sanitasi masyarakat yang berada di kuintil terbawah (40.1%) tidak sampai setengah dari tingkat akses sanitasi masyarakat yang berada di kuintil tertinggi (84.3%). Namun hingga tahun 2021, akses sanitasi pada masyarakat miskin secara berangsur-angsur meningkat, mengejar ketertinggalannya dari kuintil yang lebih tinggi. Kesenjangan dalam akses sanitasi juga terjadi antar wilayah di Indonesia dimana terdapat lebih banyak kota dengan akses sanitasi yang minim di wilayah Indonesia Timur dibandingkan wilayah Indonesia lainnya.

Terakhir, pada akses air bersih dan listrik. Akses listrik di Indonesia sudah cukup merata bagi setiap kelompok pengeluaran dan untuk sebagian besar wilayah di Indonesia. Lain halnya dengan akses air bersih yang masih cukup buruk di beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat dan Papua Pegunungan.

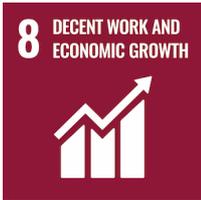


Gambar 5. Akses Terhadap Elektrifikasi dan Air Bersih

Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum, terjadi perbaikan kondisi ketimpangan di Indonesia meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam perbaikannya. Yang pertama adalah ketimpangan antarwilayah dimana masih ada ketimpangan antara Jawa dan Luar Jawa serta wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, ketimpangan juga masih terjadi di pasar tenaga kerja dimana ketimpangan terjadi antarwilayah dan berdasarkan gender. Hal ini juga ditambah dengan ketimpangan dalam akses terhadap jaminan sosial.

Penurunan ketimpangan terjadi dalam kepemilikan aset, yang kontras dengan temuan dari ketimpangan ekonomi, menunjukkan bahwa ketimpangan aset fisik lebih banyak terjadi di daerah Luar Jawa dan di pedesaan. Sementara itu, dalam hal pendidikan, terjadi ketimpangan dalam hal pendidikan tinggi antarkuintil pengeluaran. Akses terhadap jaminan kesehatan juga terjadi dimana masyarakat dengan kuintil pengeluaran tinggi lebih mudah mengakses kesehatan secara relative dibandingkan



dengan masyarakat di kuintil pengeluaran yang lebih rendah. Ketimpangan juga terjadi dalam hal konektivitas (digital), akses air dan anitasi, serta elektrifikasi.

Melihat tantangan-tantangan tersebut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperluas layanan dasar bagi masyarakat di kuintil pengeluaran bawah dengan penyediaan jaminan sosial. Hal ini termasuk perluasan dan peningkatan efektivitas program yang sudah ada sekarang.

Yang kedua adalah memfasilitasi formalisasi aktivitas ekonomi. Dengan proporsi sektor informal Indonesia yang masih tinggi, maka masyarakat yang rentan (terutama perempuan) masih cenderung bekerja di sektor informal sehingga masih banyak yang belum terlindungi. Oleh karena itu, peningkatan penetrasi jamnan sosial untuk pekerja informal perlu ditingkatkan.

Yang terakhir adalah mendorong pembangunan industri. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan akibat adanya dugaan terjadinya deindustrialisasi, membuat perbaikan ketimpangan ekonomi cenderung melambat. Oleh karena itu, dorongan industrialisasi dimungkinkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan bonus demografi Indonesia.

Referensi:

Hanri Muhammad, Andhika Putra Pratama, Calista Endrina Dewi, Uomo Noor Rachmanto, Muhammad Amin Rizky, Lili unita. (2023). Inequality Diagnostic Report for Indonesia. LPEM FEB UI in collaboration with AFD.

